

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia :berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rachmad Budiono, 2000, *Hukum Peburuhan di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, 2005, *Buku Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang Tahun 2005*, Magelang
- Halili Thohal, 1999, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Jakarta, Penerbit PT. Bina Pradya Paramita.
- Imam Supomo, 2000, *Pengantar Hukum perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Kansil, 1985, *Pokok-Pokok pemerintahan di Darah*, Jakarta, Aksara Baru.
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- Manulang Sendjun H, (1995), *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sarundajang, 2000 *Arus Balik, Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Sendjum Manulang W, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Zainal Asikia, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Administrasion To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja..

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-204/Men/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 30 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dians Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Serta Unit

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG**

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Magelang?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam peningkatan kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Magelang?
4. Program-program apa saja yang dilakukan Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Magelang?